

# **Efektivitas Program Beras Sejahtera dalam Meningkatkan Kesejahteraan masyarakat Pra Sejahtera di Kecamatan Ranoyapo Kabupaten Minahasa Selatan**

**Fraike Rumondor  
F. D. J. Lengkong  
Novie Palar**

*ABSTRACT: Rice is a prosperous food subsidy in the form of rice earmarked for low-income households as the efforts of the government to improve food security and provide social protection to targeted households. The success of Rice Program prosperity is measured by the level of achievement 6T indicators, namely: the right target, the right amount, the right price, right time, right quality and right administration. The program aims to reduce the burden of Target Households spending through the partial fulfillment of staple food needs in the form of rice and prevent a decrease in consumption of energy and protein. The purpose of this study is to identify the effectiveness of Rice Welfare Program in improving public welfare in the District Ranoyapo Pre-prosperous South Minahasa regency.*

*Data collection techniques in this research is through: Observation namely direct observation to the study site, conduct interviews and documentation. Results of the evaluation showed that the program in the District Ranoyapo prosperous rice was not effective because there are still some things that are not appropriate as the data receiver has not updated the program, the government is less involved mislead the public so that people do not know clearly the price and the actual amount of rice. Likewise, there is a supplementary budget that is charged to the public for reasons of money transport vehicles rice and supervision of the district governments are still lacking.*

*Keywords: Program Effectiveness Rice Welfare, Welfare Pre prosperous society.*

## **PENDAHULUAN**

Program subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah (Program Raskin) adalah program nasional lintas sektoral baik horizontal maupun vertikal, untuk membantu mencukupi kebutuhan pangan beras masyarakat yang berpendapatan rendah. Secara horizontal semua Kementerian/Lembaga (K/L) yang terkait memberikan kontribusi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Pemerintah Pusat berperan dalam membuat kebijakan program, sedangkan pelaksanaannya sangat tergantung kepada Pemerintah Daerah. Oleh karena itu, peran

Pemerintah Daerah sangat penting dalam peningkatan efektifitas Program Raskin.

Pada waktu terjadi krisis pangan tahun 1998 program ini pun dimulai dan untuk mengatasi krisis tersebut, Pemerintah mengambil kebijakan yaitu memberikan subsidi pangan bagi masyarakat melalui Operasi Pasar Khusus (OPK). Pada tahun 2002 program tersebut dilakukan lebih selektif dengan menerapkan sistem targeting, yaitu membatasi sasaran hanya membantu kebutuhan pangan bagi Rumah Tangga Miskin (RTM). Sejak itu program ini menjadi populer dengan sebutan program Raskin, yaitu subsidi beras bagi masyarakat miskin. Pada tahun

2008 Program ini berubah menjadi Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah. Dengan demikian rumah tangga sasaran program ini tidak hanya rumah tangga miskin, tetapi meliputi rumah tangga rentan atau hampir miskin.

Dalam pelaksanaannya selama 16 (enam belas) tahun, Pemerintah telah mengambil berbagai kebijakan untuk melakukan penyesuaian terhadap kondisi yang berkembang, misalnya penyesuaian jumlah Rumah Tangga Sasaran (RTS), durasi penyaluran, alokasi jumlah beras untuk setiap RTS (kuantum Raskin) dan penyesuaian Harga Tebus Raskin di Titik Distribusi (TD) dari Rp 1.000,-/kg menjadi Rp 1.600,-/kg. Kebijakan lain yang telah diambil pemerintah pada beberapa tahun terakhir adalah penyaluran Raskin untuk mengatasi kenaikan harga akibat musim paceklik dan meningkatnya permintaan beras pada hari-hari besar. Untuk keperluan ini pemerintah telah menyalurkan Raskin lebih dari 12 kali dalam satu tahun. Bahkan pada tahun 2013 pemerintah telah menyalurkan Raskin sampai Raskin ke-15, sebagai kompensasi kenaikan harga BBM. Pada awal tahun 2014 dilakukan percepatan penyaluran Raskin bulan November – Desember ke bulan Februari Maret dampak bencana alam yang melanda hampir di sejumlah wilayah Indonesia pada awal tahun 2014. Keberhasilan Program Raskin ditentukan mulai dari perencanaan, penganggaran, penyediaan, penyaluran, monitoring dan evaluasi, pengawasan dan penanganan pengaduan oleh K/L terkait yang tergabung dalam Tim Koordinasi Raskin Pusat.

Pelaksanaan penyaluran Raskin oleh Perum BULOG sampai Titik Distribusi (TD) di seluruh Indonesia. Pemerintah Daerah memiliki peran yang sangat strategis dalam penyaluran Raskin dari TD sampai kepada Rumah Tangga Sasaran (RTS). Dukungan yang diperlukan dari pemerintah daerah minimal pengalokasian APBD untuk angkutan beras dari TD sampai ke RTS.

Sebagai komoditi strategis yang dilindungi oleh undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945, Pangan merupakan hak yang mendasar bagi pemerintah untuk wajib memberikan prioritas yang besar terhadap kebijakan ketahanan pangan nasional.

Indonesia, 95% dari jumlah penduduknya mengkonsumsi beras sebagai pangan utama, dengan rata-rata konsumsi beras sebesar 102 kg/jiwa/tahun (bps, 2013). Tingkat konsumsi tersebut jauh di atas rata-rata konsumsi dunia yang hanya sebesar 60 kg/kapita/tahun. Dengan demikian Indonesia menjadi negara konsumen beras terbesar di dunia. Beras menjadi komoditas nasional yang sangat strategis. Instabilitas perberasan nasional dapat mengakibatkan gejolak dalam berbagai aspek kehidupan baik sosial, politik maupun ekonomi. Peranan komoditi makanan terhadap garis kemiskinan jauh lebih besar dibandingkan dengan komoditi bukan makanan seperti perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan.

Program raskin pada bulan september 2015 telah di ganti nama menjadi program beras sejahtera oleh menteri sosial yang pada dasarnya untuk mengubah paradigma

masyarakat bukan untuk membantu masyarakat miskin, melainkan program ini disubsidi pemerintah untuk mengubah kehidupan masyarakat menjadi lebih sejahtera.

Penyaluran rastra ini merujuk pada Surat Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan Nomor 6-100/MENKO/PMK/XXI/2015 tanggal 15 Desember 2015 Dengan Perihal Rastra Provinsi Tahun 2016 dan Penetapan anggaran subsidi beras yang merujuk pada Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2012 tentang kebijakan pengadaan Gabah/Beras dan penyaluran beras oleh pemerintah dan Surat Keputusan pejabat gubernur Sulawesi Utara, nomor 17/2016 tentang penetapan pagu program subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah kabupaten/kota se-sulawesi 2016.

Presiden menginstruksikan kepada menteri dan kepala lembaga pemerintah non kementerian tertentu, serta gubernur dan bupati/walikota diseluruh Indonesia untuk melakukan upaya peningkatan pendapatan petani, ketahanan pangan, pengembangan ekonomi perdesaan dan stabilitas ekonomi nasional. Secara khusus kepada perum bulog diinstruksikan untuk menyediakan dan menyalurkan beras bersubsidi bagi kelompok masyarakat berpendapatan rendah, dan rawan pangan yang penyediaannya mengutamakan pengadaan gabah/beras dari petani dalam negeri.

Penyaluran beras bersubsidi bagi kelompok masyarakat berpendapatan rendah bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran para RTS PM dalam memenuhi

kebutuhan pangan. Selain itu juga untuk meningkatkan akses masyarakat berpendapatan rendah dalam pemenuhan kebutuhan pangan pokok, sebagai salah satu hak dasarnya.

Tujuan pemerintah untuk memberikan bantuan pada keluarga miskin tidak luput dari penyimpangan. Menurut pemantauan dilapangan, ada tiga hal yang terjadi dalam penyaluran program rastra. Pertama, mengenai salah sasaran. Program rastra yang semestinya disalurkan atau dijual kepada keluarga-keluarga miskin ternyata (banyak juga yang) jatuh pada kelompok masyarakat lain (keluarga sejahtera). Salah sasaran ini banyak disebabkan oleh human error, dimana para petugas lapangan justru membagi-bagikan kupon rastra pada keluarga dekat atau teman kerabatnya. Bahkan tidak sedikit keluarga sejahtera yang "menagih jatah" beras murah tersebut.

Kedua, jumlah beras yang dibagikan sering tidak sesuai dengan apa yang telah diprogramkan. Jumlah rastra yang dijual kepada masyarakat (pra sejahtera) sudah pasti berkurang karena pembagian beras, sering tidak diukur dalam bentuk kilogram (sesuai dengan program) tetapi dalam liter, sehingga kuantitas beras yang diterima tak sesuai dengan apa yang telah diprogramkan. Kekurangan jumlah itu juga terjadi karena petugas lapangan berusaha untuk bertindak adil dengan membagikan rastra kepada (hampir) seluruh warga termasuk yang tidak menerima kupon.

Penyelewengan yang ketiga, berhubungan dengan hal sebelumnya, yakni

disebabkan kesalahan data jumlah keluarga miskin yang tidak cepat diperbaharui. Hal ini terjadi akibat masih buruknya koordinasi antara birokrasi baik dari pusat, provinsi, kabupaten/kota, hingga desa, atau kelurahan. Akibatnya, kuantitas (jumlah) keluarga miskin yang didata bisa lebih besar atau lebih sedikit dari yang sebenarnya, sehingga Rastra yang dibagikan akan berdampak pada kekurangan atau (bahkan) kelebihan jatah.

Dengan adanya program rastra pemerintah berharap untuk dapat memenuhi sebagian kebutuhan pangan (beras) keluarga miskin dan sekaligus mengharapkan dapat mengurangi beban pengeluaran keluarga miskin, selain itu juga untuk meningkatkan/membuka akses pangan keluarga miskin dalam rangka meningkatkan ketahanan pangan di tingkat keluarga melalui penjualan beras kepada keluarga penerima manfaat pada tingkat harga bersubsidi dengan jumlah yang telah ditentukan.

Banyaknya jumlah penduduk miskin yang tersebar di berbagai pelosok daerah mengindikasikan perlunya sebuah bantuan program yang berbasis pada masyarakat miskin. Jumlah penduduk Miskin di Sulawesi Utara (Sulut) per Maret 2015 mencapai 208,54 ribu jiwa. Bertambah sekira 10,98 ribu jiwa dibanding dengan jumlah pada September 2014 sebanyak 197,56 ribu. Penduduk miskin per Maret naik 0,39 persen dibanding tahun 2014. Adapun tahun 2015, persentase penduduk miskin sebesar 8,65 persen dari keseluruhan jumlah penduduk di Sulut. Sedangkan posisi September tahun 2014, hanya sebesar 8,26 persen dan tersebar di

kabupaten/kota yang ada dan salah satunya adalah Kecamatan Ranoyapo.

Pada tahun ini Kecamatan Ranoyapo menerima jatah 15 kg tiap RTS. Jumlah RTS yaitu 1.387 dengan jumlah kuantum beras yang diperoleh yaitu 20.805 kg . Meskipun seringkali tujuan pemerintah untuk memberikan bantuan pada keluarga miskin tidak luput dari penyimpangan, diantaranya seperti ketidaktepatan sasaran penerima rastra, keterlambatan pendistribusian dan rendahnya kualitas beras yang diterima keluarga miskin. Oleh sebab itu efektifitas pelaksanaan program rastra harus dievaluasi agar program ini berjalan dengan optimal dan indikator keberhasilan dapat dicapai. Karena jika efektifitas program rastra rendah maka akan berpengaruh kepada kelangsungan hidup keluarga miskin dan akses mereka terhadap pangan (beras). Berdasarkan uraian diatas penulis merasa tertarik untuk membahas permasalahan ini dan melakukan penelitian dengan judul “Efektifitas Program beras sejahtera dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Prasejahtera di Kecamatan Ranoyapo Kabupaten Minahasa Selatan.

Perumusan masalah dalam penelitian ini ialah : “Bagaimana Efektivitas Program beras sejahtera dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Prasejahtera di Kecamatan Ranoyapo Kabupaten Minahasa Selatan”.

Tujuan Penelitian ini yakni:

1.Menggambarkan efektivitas proses pelaksanaan Program Rastra di Kecamatan Ranoyapo Kabupaten Minahasa Selatan?

2. Menganalisa efektivitas pelaksanaan program rastra di Kecamatan Ranoyapo Kabupaten Minahasa Selatan?

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi ilmu pengetahuan yang bersifat akademis, khususnya dalam kajian ilmu administrasi negara dan secara praktik penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah khususnya efektivitas program rastra di kecamatan Ranoyapo Kabupaten Minahasa Selatan.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian yang baik apabila mempunyai metodologi yang benar. Jenis penelitian yang digunakan yaitu metode kualitatif. Dalam penelitian ini berfokus pada penelitian lapangan dalam bentuk studi kasus (*case study*), yaitu penelitian yang dilakukan untuk mengkaji gejala-gejala sosial dari suatu kasus dengan cara menganalisisnya secara mendalam di lingkungan masyarakat tertentu, baik di lembaga-lembaga sosial kemasyarakatan, maupun lembaga pemerintah.

Dalam Penelitian ini penulis melakukan penelitian secara langsung di Kecamatan Ranoyapo Kabupaten Minahasa Selatan yang dijadikan sebagai tempat penelitian.

Dalam penelitian ini yang akan menjadi fokus penelitian adalah Efektivitas Program Beras Sejahtera dalam meningkatkan Kesejahteraan masyarakat Prasejahtera, dimana peneliti akan fokus pada efektif tidaknya program tersebut.

Konsep ialah istilah yang digunakan untuk menggambarkan secara abstrak kejadian, keadaan, kelompok, atau individu yang menjadi pusat perhatian ilmu sosial (Singarimbun:2006), sehingga dengan konsep maka peneliti akan bisa memahami unsur-unsur yang ada dalam penelitian baik variabel, indikator, parameter, maupun skala pengukuran yang dikehendaki di dalam penelitian.

Untuk mendapatkan batasan yang jelas dari masing-masing konsep yang akan diteliti. Adapun definisi konsep dari penelitian ini, yaitu:

1. Efektivitas adalah suatu keadaan yang menunjukkan sejauh mana rencana dapat tercapai. Semakin banyak rencana yang dapat dicapai, semakin efektif pula kegiatan tersebut, sehingga kata efektivitas dapat juga diartikan sebagai tingkat keberhasilan yang dapat dicapai dari suatu cara atau usaha tertentu sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai.
2. Program Beras Sejahtera adalah suatu program pemerintah dalam upaya meningkatkan ketahanan pangan dan memberikan perlindungan kepada keluarga miskin melalui pendistribusian beras dalam jumlah dan harga tertentu yang diharapkan dapat berdampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan dan ketahanan pangan keluarga miskin dan secara tidak langsung berdampak terhadap peningkatan gizi, peningkatan kesehatan, pendidikan produktivitas keluarga miskin.

Jadi, pengertian Efektivitas program beras sejahtera adalah suatu keadaan yang menunjukkan sejauh mana rencana atau

program beras sejahtera yang diterapkan oleh pemerintah dapat tercapai dengan efektif dan efisien demi melangsungkan kesejahteraan masyarakat pra sejahtera atau masyarakat berpendapatan rendah.

Data merupakan rekaman atau gambaran atau keterangan tentang suatu hal atau fakta. Sumber data adalah dari mana data penelitian tersebut diperoleh. Dalam penelitian ini ada dua jenis sumber data yaitu sumber data primer dan sekunder.

#### a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber data yang pertama. Yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh langsung dari tempat dimana penelitian tersebut dilakukan yakni berupa hasil wawancara langsung dengan aparat desa dan masyarakat di Kecamatan Ranoyapo kabupaten minahasa selatan khususnya pelaksana dan pengawas distribusi serta penerima beras bersubsidi .

#### b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang tidak di peroleh langsung dari sumber data yang pertama, melainkan melalui orang lain atau melalui dokumen. Data sekunder dalam penelitian ini yaitu profil Kecamatan Ranoyapo kabupaten minahasa, dokumen tentang jumlah alokasi Rastra dan pedoman penyaluran rastra.

Informan adalah orang yang akan menjadi sumber informasi dalam penelitian ini di antaranya 15 orang yaitu kepala kantor kecamatan, sekretaris kantor kecamatan, kepala urusan bagian rumah tangga, hukum tua dan sekretaris hukum tua, kepala Urusan

pemerintahan, kepala jaga, wakil kepala jaga, dan 7 unsur masyarakat yang menerima bantuan beras Sejahtera.

Dalam Penelitian ini, lokasi yang akan digunakan oleh penulis untuk menjadi tempat penelitian adalah kecamatan Ranoyapo kabupaten Minahasa Selatan.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan tiga metode pengumpulan data, yaitu:

#### a. Pengamatan (Observasi)

Observasi yaitu kegiatan melihat, mengamati, dan mencermati serta mencatat secara sistematis fenomena-fenomena yang diselidiki untuk suatu tujuan tertentu. Dalam penelitian ini penulis terjun langsung ke lokasi yaitu untuk menyelidiki praktek distribusi bagi rata beras bersubsidi untuk masyarakat berpendapatan rendah di Kecamatan Ranoyapo Kabupaten Minahasa Selatan yaitu tentang dari mana dan dimana beras bersubsidi di serahterimakan, siapa yang bertanggung jawab untuk membaginya, kapan dan berapa kali beras didistribusikan dalam setahun serta bagaimana mekanisme pembagian beras bersubsidi kepada masyarakat.

#### b. Wawancara (Interview)

Wawancara yaitu bentuk komunikasi langsung yang berupa tanya jawab oleh penulis dengan pihak-pihak yang terkait dengan masalah yang sedang diteliti. Wawancara dilakukan kepada pihak-pihak yang terkait langsung maupun tidak langsung dalam persoalan yang terkait, yakni aparat desa dan pelaksana distribusi beras bersubsidi, serta masyarakat di kecamatan Ranoyapo khususnya yang mendapatkan beras.

### c. Dokumentasi

Metode dokumentasi yaitu dokumen tertulis tentang berbagai peristiwa pada waktu tertentu sebagai acuan bagi peneliti untuk mempermudah penelitiannya. Yang menjadi dokumentasi dalam penelitian ini adalah data tentang profil Kecamatan Ranoyapo Kabupaten Minahasa Selatan, data tentang jumlah penerima rastra, dan pedoman umum penyaluran Rastra.

Analisis data adalah kegiatan menganalisis dan menyimpulkan data apabila semua data penelitian telah terkumpul. Dalam menganalisis data, penulis akan menggunakan metode deskriptif normatif dengan pendekatan kualitatif. Metode deskriptif normatif yaitu metode dalam menganalisis data dengan membuat deskripsi atau gambaran-gambaran tentang fenomena-fenomena, fakta-fakta, serta hubungan antar satu fenomena dengan fenomena lainnya yang berdasar atas aturan-aturan normatif yang terkait dengan fenomena-fenomena tersebut.

## **PEMBAHASAN**

Efektivitas pelaksanaan program beras sejahtera dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat prasejahtera di Kecamatan Ranoyapo di uraikan berdasarkan kriteria-kriteria efektivitas berikut ini:

### 1. Pencapaian Tujuan

Pencapaian Tujuan adalah keseluruhan upaya pencapaian tujuan harus dipandang sebagai suatu proses. Oleh karena itu, agar pencapaian tujuan akhir semakin terjamin, diperlukan pentahapan, baik dalam arti pentahapan pencapaian bagian-bagiannya

maupun pentahapan dalam arti periodisasinya. Pencapaian tujuan terdiri dari beberapa faktor, yaitu: Kurun waktu dan sasaran yang merupakan target kongkrit.

Pencapaian tujuan yang dilakukan oleh pemerintah kecamatan ranoyapo sejauh ini belum terlalu baik karena tujuan sebenarnya selalu melenceng. Program beras sejahtera ini kurang sepenuhnya membantu masyarakat miskin untuk mengurangi beban pengeluaran perbulannya. Kendala yang dialami masyarakat yaitu waktu selalu terlambat dalam penyaluran beras ini serta sasaran dari penerima manfaat ini belum ditindak lanjuti oleh pemerintah yang seharusnya tegas dalam mendata keluarga yang berhak mendapatkannya.

### 2. Integrasi

Integrasi yaitu pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi untuk mengadakan sosialisasi, pengembangan konsensus dan komunikasi dengan berbagai macam organisasi lainnya. Integrasi menyangkut proses sosialisasi.

Sampai saat ini jika dilihat dalam penelitian, pemerintah dan masyarakat kurang bekerja sama dalam pelaksanaan program beras sejahtera. Pemerintah kurang memberikan informasi mengenai program ini kepada masyarakat.

### 3. Adaptasi

Adaptasi adalah kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Untuk itu digunakan tolak ukur proses pengadaan dan pengisian tenaga kerja.

Kemampuan pemerintah dalam menyesuaikan diri dengan masyarakat dalam program beras sejahtera kurang baik. Para petugas yang sudah dipercayakan untuk mengukur beras bisa dibilang tidak adil. Jadi pemerintah harus sebenarnya memberikan beras yang lebih sesuai dengan aturan yang ada. Tingkat keberhasilan yang dapat dicapai pemerintah yaitu ketika masyarakat merasa sejahtera.

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang ada maka penulis menyimpulkan:

#### 1. Pencapaian Tujuan

Pencapaian tujuan dikecamatan Ranoyapo belum tercapai disebabkan di beberapa desa pemerintah tidak mampu memberdayakan masyarakat dengan maksimal serta kualitas beras yang masih kurang pun mengakibatkan tidak efektifnya program beras sejahtera sehingga pelayanan kepada masyarakat masih kurang. Tujuan sebenarnya untuk membuat masyarakat sejahtera melalui program ini tidak bisa dicapai diakibatkan oleh berbagai kendala dan masalah.

#### 2. Integrasi

Integrasi yang ada di kecamatan ranoyapo kurang baik karena pemerintah tidak mampu untuk memberikan informasi yang baru kepada masyarakat tentang program ini juga pemerintah kurang menyesuaikan perubahan data yang ada.

#### 3. Adaptasi

Pemerintah harus mengadakan kerjasama dan lebih teliti. Pemerintah tidak

mampu melaksanakan program dengan sebaik mungkin karena masyarakat masih melihat tindakan penyelewengan yang dilakukan aparat pemerintah setempat yang ada.

### **Saran**

Dari kesimpulan diatas maka penulis memberikan saran:

1.Pemerintah khususnya menteri sosial wajib meninjau kembali BULOG secara khusus mengenai kualitas beras yang disalurkan agar benar-benar tujuannya terlaksana demi kesejahteraan masyarakat. Pemerintah desa harus lebih bekerja sama dengan setiap kepala lingkungan, hendaknya memberikan informasi yang baik kepada masyarakat agar supaya masyarakat dapat mengetahui maksud dari program ini.

2.Pemerintah diharapkan melakukan Pendataan kembali dan mengawasi dengan baik pendistribusian kepada RTS-PM juga hendaknya pemerintah desa selalu membuat sosialisasi kepada semua masyarakat mengenai aturan yang dibuat agar supaya dalam membangun dan memberdayakan program masyarakat boleh menjadi lebih efisien lagi.

3.Pemerintah hendaknya melakukan pengawasan dengan sebaik mungkin agar supaya tidak terdapat penyalahgunaan, dan juga agar supaya beras sejahtera yang ada memang digunakan untuk kepentingan masyarakat, sehingga masyarakat boleh merasa puas dengan beras sejahtera yang ada dan pemerintah harus sebenarnya memberikan beras yang lebih sesuai dengan aturan yang ada.



## DAFTAR PUSTAKA

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta :PT Rineka Cipta, 2006, hlm. 129

Sumardi Suryabrata, *Metodolog Penelitian*. Jakarta :PT Raja Grafindo Persada,1998,Cet. II., hlm 22.

Tangkilisan (2005:141) *Management Publik*.Jakarta: Gramedia Widja Sarana Indonesia.

SK Keputusan pejabat gubernur sulawesi utara, nomor 17/2016 tentang penetapan pagu program subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah kabupaten/kota se-sulut 2016.

Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2012 tentang kebijakan pengadaan Gabah/Beras dan penyaluran beras oleh pemerintah.

Keputusan menteri kordinator bidang kesejahteraan rakyat republik indonesia nomor 54 tahun 2014 tentang pedoman umum raskin tahun 2015.